

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Sejarah Danantara

Saat resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal TNI (HOR.) (Purn). H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Di antaranya adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah, ketidak merataan pembangunan infrastruktur, serta ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor tradisional seperti pertambangan dan pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, Prabowo bertekad melakukan reformasi ekonomi guna mendorong laju pertumbuhan hingga mencapai 8%. Salah satu strategi utama yang diusung adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara, terutama aset-aset yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelum berdirinya Danantara, aset milik BUMN dikelola secara terpisah oleh masing-masing entitas dan kementerian terkait, yang kerap mengakibatkan tumpang tindih tugas, koordinasi yang lemah, serta inefisiensi dalam pengelolaan. Gagasan untuk menyatukan pengelolaan aset-aset strategis ini sebenarnya telah muncul sejak lama. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo yang dikenal sebagai ekonom berpengaruh pada masa Orde Lama dan Orde Baru, telah mencetuskan ide serupa pada dekade 1980-an. Ia membayangkan adanya sebuah institusi yang mengelola keuntungan BUMN dan menginvestasikannya dalam proyek-proyek strategis, serupa dengan model sovereign wealth fund (SWF) seperti Temasek di Singapura atau Government Pension Fund di Norwegia. Namun, saat itu gagasan tersebut belum dapat direalisasikan karena hambatan politik dan kondisi ekonomi (Siswoyo, 2025).

Memanfaatkan momentum dan peluang di era saat ini, serta didukung oleh para teknokrat dan pakar ekonomi, Prabowo mengambil inisiatif untuk mewujudkan visi tersebut melalui pembentukan Danantara. Lembaga ini dikonsepsikan sebagai

superholding BUMN yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aset strategis negara secara terpusat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dasar hukum pembentukan Danantara diperkuat melalui amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan oleh DPR RI pada 4 Februari 2025. Amandemen ini menetapkan struktur organisasi, tugas, serta kewenangan lembaga yang diberi nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Di hari yang sama, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 juga ditetapkan untuk mengangkat Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. Peluncuran resmi lembaga ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagai penanda dimulainya operasional Danantara (Siswoyo, 2025).

Nama “Danantara” dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan nilai-nilai filosofis. Kata “Daya” mencerminkan kekuatan atau potensi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” mewakili identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara keseluruhan, nama ini menggambarkan tekad untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Dalam pidato peluncurannya, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan dikelola secara akuntabel, transparan, dan terbuka terhadap audit, demi menjaga kepentingan generasi yang akan datang (Siswoyo, 2025).

1.1.2 Visi dan Misi Danantara

Danantara bertujuan mendorong transformasi perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang berkelanjutan. Sebagai lembaga pengelola investasi yang memiliki posisi strategis, Danantara memanfaatkan BUMN sebagai fasilitator dalam menyalurkan investasinya. Tujuan akhirnya adalah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) yang kompetitif secara global, guna memperkuat pembangunan nasional

dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia (Luthfia, 2025).

Untuk merealisasikan visinya, Danantara telah menetapkan lima misi pokok (Luthfia, 2025):

- a. Pengelolaan kekayaan negara secara akuntabel, profesional, dan berkelanjutan dengan prinsip tata kelola yang baik, sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan misi Asta Cita.
- b. Pemanfaatan aset strategis milik BUMN secara optimal agar menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi pada sektor-sektor strategis sebagai katalisator utama.
- d. Meningkatkan arus investasi dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat daya saing Indonesia secara global.
- e. Pembentukan institusi Sovereign Wealth Fund yang independen, unggul, dan berorientasi pada keberlanjutan serta pengelolaan keuangan yang sehat.

1.1.3 Struktur Organisasi Danantara

Danantara berada di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia ke-8. Struktur organisasinya terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana. Berikut penjelasan masing-masing komponen berdasarkan tugasnya (Siswoyo, 2025).

1.1.3.1 Dewan Pengawas

Pengawasan atas operasional Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dilakukan oleh Dewan Pengawas yang dibentuk melalui penunjukan Presiden. Terdapat empat anggota dewan, dengan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua. Wakil ketua dijabat oleh Muliaman D. Hadad, mantan Deputy Gubernur BI dan eks Ketua Dewan Komisiner OJK. Anggota lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris.

1.1.3.2 Dewan Penasehat

Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki pengalaman strategis. Fungsi utama dewan ini adalah memberikan masukan dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang Danantara. Dua tokoh yang dipercaya mengisi posisi ini adalah Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

1.1.3.3 Badan Pelaksana

Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian Danantara. Anggotanya merupakan profesional yang diangkat Presiden dan memiliki keahlian di bidang investasi, keuangan, ekonomi, serta manajemen. Mereka menyusun rencana kerja, mengelola aset, dan mewakili Danantara dalam urusan hukum. Berikut profil tokoh kunci dalam badan ini (Siswoyo, 2025):

a. Rosan Perkasa Roeslani – *Chief Executive Officer* (CEO)

Lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968, Rosan adalah profesional dengan pengalaman luas dalam bidang ekonomi dan investasi. Ia meraih gelar Bachelor of Arts dari Oklahoma State University dan MBA dari Antwerpen European University. Jabatan publik yang pernah diembannya antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Menteri BUMN, Duta Besar Indonesia untuk AS, dan Ketua Umum KADIN. Pengalamannya menjadikannya sosok yang layak memimpin Danantara.

b. Pandu Patria Sjahrir – *Chief Investment Officer* (CIO)

Sebagai pengusaha muda dan keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu aktif di berbagai sektor strategis seperti energi dan teknologi. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama, Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik, serta Komisaris Utama GoTo Financials. Kepakarannya mendukung Danantara dalam pengembangan investasi berkelanjutan.

c. Dony Oskaria – *Chief Operating Officer (COO)*

Dony, yang lahir di Sumatera Barat pada 26 September 1969, memiliki latar belakang kuat dalam manajemen dan industri pariwisata. Sebelum bergabung dengan Danantara, ia menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama InJourney. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar MBA dari Asian Institute of Management, Filipina. Kompetensinya berkontribusi besar dalam pengelolaan operasional Danantara.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Investasi merupakan aktivitas perekonomian yang sangat penting dilakukan oleh suatu negara guna mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga, dividen, atau apresiasi nilai aset serta melindungi harta atau aset negara dan cadangan keuangan untuk pengelolaan program pembangunan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, properti, obligasi, dan reksadana. Tak terkecuali negara republik Indonesia yang saat ini memiliki dua badan pengelola investasi (BPI) yaitu Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) (Akashi, 2025).

Sebelumnya, melalui perpres nomor 74 tahun 2020 presiden ketujuh, Joko Widodo meluncurkan badan pengelola investasi yang bernama *Indonesia Investment Authority (INA)* sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Abadi, yaitu lembaga yang mengelola kekayaan negara melalui investasi strategis agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan memperkuat daya saing dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun karena jangkauannya kewenangannya kurang memadai untuk menjalankan fungsinya sehingga presiden membentuk badan pengelola investasi baru yaitu Danantara.

Danantara memiliki arti kekuatan ekonomi yaitu energi kekuatan untuk tanah air Indonesia. Yang didirikan melalui undang undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN yang bersifat SWF atau dana abadi atau dana investasi pemerintah, Danantara

memiliki cakupan yang lebih luas dari BPI INA. Jika INA hanya memiliki satu pilar yaitu SWF, Danantara memiliki pilar lain selain SWF yaitu development investment (pengembangan investasi) dan juga asset management (manajemen aset). Selain itu Danantara tidak hanya mengelola dana APBN, tetapi juga mengelola kepemilikan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia dan juga aset dari kementerian (Muzzaki et al., 2025).

Saat ini BPI Danantara mengelola aset negara mencapai USD 900 milyar atau setara dengan Rp. 15.000 triliyun dan diberikan dana awal sebesar USD 20 miliar yang diharapkan menjadi langkah transformatif untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% menjadi 8%, dengan fokus investasi pada berbagai sektor dalam lima tahun kedepan (Puspita, 2025). Selain itu Danantara juga ditargetkan dapat membuka 3 juta lapangan pekerjaan dan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 235,9 miliar USD yang tentunya akan memperkuat perekonomian negara dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global (Harahap, 2025).

Dibalik ambisi besar dan luasnya cakupan pengelolaan aset dan investasi terhadap Danantara, ada beberapa anggapan buruk publik yang timbul akibat pembentukan Danantara, seperti ladang korupsi politik baru, karena publik masih trauma dengan kasus skandal yang menimpa beberapa perusahaan di tubuh BUMN seperti PT Asabri, Jiwasraya, PT timah hingga korupsi PT Pertamina.

Pebentukan regulasi BPI Danantara disahkan DPR hanya hitungan minggu. Pejabatnya pun diisi oleh tim pemenangan prabowo gibran pada kampanye pilpres lalu, seperti CEO Danantara yang duduki oleh rosan roesliani yang merupakan direktur ketua TKN prabowo gibran dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Beberapa menteri kabinet prabowo juga merangkap sebagai dewan pengawas Danantra seperti menteri keuangan dan menteri

BUMN (Wijianto, 2025). Organ Danantara bukan penyelenggara negara sehingga tidak dapat diperiksa oleh KPK dan kerugian Danantara tidak dianggap sebagai kerugian negara sehingga memunculkan celah korupsi.

kebijakan ini memunculkan respons publik yang beragam. Di satu sisi, Danantara diproyeksikan menjadi superholding BUMN yang dapat menarik investasi dan memperkuat daya saing Indonesia secara global, Disisi lain sebagai kekuatan politik. masyarakat banyak mempertanyakan aspek transparansi, independensi, dan potensi intervensi (Baderi, 2025).

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai struktur kepengurusan Danantara dapat membuka keran intervensi politik dari pemerintah. Ditambah lagi dalam UU BUMN menyatakan bahwa organ Danantara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika mereka bisa membuktikan kerugian itu bukan akibat kelalaian atau kesalahan serta tidak wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau KPK, Tidak heran jika publik berkomentar buruk tentang Danantara setelah keleluasan yang diberikan dan juga pengalaman buruk tentang perusahaan BUMN. Meskipun tidak sedikit juga masyarakat yang optimis dan memberikan penilaian positif terhadap BPI Danantara.

Kondisi ini mengindikasikan terjadinya polarisasi opini publik yang mencerminkan resistensi maupun dukungan terhadap kebijakan tersebut. Polarisasi ini banyak dimanifestasikan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, di mana masyarakat menyuarakan pendapatnya secara terbuka (Megginson & Gao, 2020).

Beberapa media yang mengabarkan informasi launching perdana Danantara di platform media sosial dibanjiri komentar netizen diantaranya Platform Twitter atau yang sekarang dikenal dengan media X terjadi lonjakan respons publik secara masif pasca-peluncuran Danantara. Hal ini tampak dari sejumlah unggahan yang viral dan menyedot perhatian jutaan pengguna. Salah satu contohnya adalah unggahan dari akun

media (Tempo.co, 2025a) yang meraih 4,3 juta tayangan dan dibagikan ulang (repost) sebanyak 20 ribu kali. Unggahan ini memicu berbagai komentar dari pengguna yang sebagian besar menunjukkan nada negatif atau kritis terhadap program tersebut. Demikian pula pada unggahan dari akun (Dokter Tifa, 2025) yang memperoleh 680 ribu tayangan dan 2.900 repost. Komentar-komentar yang muncul pada unggahan ini didominasi oleh respons yang mempertanyakan transparansi, efektivitas, serta motif dari peluncuran program Danantara. Pola keterlibatan publik ini menunjukkan bahwa Twitter menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan kritis dan membangun narasi oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena ini menandakan bahwa ruang digital, khususnya Twitter, tidak hanya menjadi wadah penyebaran informasi, tetapi juga sebagai medan diskusi dan konfrontasi opini, yang dapat merepresentasikan resistensi publik terhadap kebijakan secara nyata.

Pada platform TikTok, peluncuran Danantara memicu gelombang reaksi publik yang terekam dalam jumlah komentar tinggi pada konten-konten yang diunggah oleh media arus utama maupun pengguna individu. Misalnya, unggahan dari akun media (Metro Tv, 2025) mencatat 1.060 komentar, (Kompas Tv Indonesia, 2025) Indonesia memperoleh 829 komentar, dan (Tempo.co, 2025b) mencapai angka 4.086 komentar. Mayoritas komentar pada unggahan-unggahan ini mengandung sentimen negatif, menunjukkan adanya ketidakpuasan, kritik, bahkan kecemasan publik terhadap kebijakan tersebut. Tak hanya dari media, banyak pengguna TikTok yang membuat konten berupa video kritik terhadap Danantara (VT), yang juga dibanjiri komentar publik dengan nada serupa. Ini menunjukkan bahwa TikTok bukan hanya platform hiburan, tetapi juga telah menjadi kanal penting bagi ekspresi sosial-politik masyarakat, terutama generasi muda, yang secara aktif memanfaatkan format video pendek untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, di Instagram, respons publik terhadap peluncuran Danantara juga menunjukkan kecenderungan serupa. Unggahan dari akun (Katada.co.id, 2025) menerima 998 komentar, (Kompas.com, 2025) mendapatkan 1.250 komentar, dan

(Liputan 6, 2025) mencapai 1.092 komentar. Di antara komentar-komentar tersebut, sebagian besar bersifat negatif, mengandung kritik, sarkasme, dan penolakan terhadap kebijakan yang diumumkan. Selain itu, banyak pengguna Instagram yang secara langsung mengunggah konten kritik dalam bentuk postingan atau cerita (story), yang kemudian juga mengundang diskusi publik melalui kolom komentar. Interaksi yang terjadi di Instagram menegaskan bahwa platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media visual dan lifestyle, tetapi juga sebagai ruang partisipatif dalam diskursus kebijakan publik. Keberadaan sentimen negatif yang konsisten di berbagai unggahan memperkuat indikasi bahwa masyarakat luas, khususnya pengguna media sosial, tengah mengalami polarisasi sikap terhadap program Danantara.

Penting bagi pemerintah untuk mengetahui sentimen publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan sebagai evaluasi dan mengetahui sikap masyarakat terhadap kebijakan apakah oposisi atau mendukung program pemerintah.

Seiring perkembangan teknologi dan inovasi, pengukuran sentimen publik dapat dilakukan menggunakan Artificial Intelligence (AI) dengan memasukkan aplikasi yang dijadikan subjek dalam mengukur sentimen seperti Instagram, tiktok dan twitter. dan dapat digunakan untuk mengambil sampel dan mengukur tingkatan sentimen masyarakat terhadap program atau kebijakan pemerintah. Terdapat beberapa jenis Algoritma AI yang digunakan untuk mengukur sentimen diantaranya Logistic Regression, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, Naive Bayes, and K-Nearest Neighbors (KNN), hasil penelitian ini menunjukkan diantara beberapa mekanisme diatas, Support Vector Machine (SVM) memiliki keberhasilan yang lebih baik mencapai 87% tingkat akurasi (Sugiarti et al., 2024).

Support Vector Machine (SVM) adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin (machine learning) yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM dianggap lebih akurat karena Data teks sering kali memiliki dimensi yang sangat tinggi seperti banyak fitur dari tokenisasi, n-grams, TF-IDF, dll. bekerja dengan baik dalam ruang

berdimensi tinggi dan tetap efektif meskipun jumlah fitur jauh lebih besar daripada jumlah sampel. SVM mampu menemukan hyperplane terbaik yang memaksimalkan margin antar kelas, sehingga tetap bisa bekerja dengan baik meskipun distribusi data tidak merata.

Dibandingkan model seperti Decision Tree atau K-NN yang lebih rentan terhadap *overfitting*, SVM menggunakan prinsip *Structural Risk Minimization* (SRM) yang membantu menemukan model yang lebih generalisasi sehingga Mengatasi Overfitting dengan Margin Maksimum. Dalam data teks, sering kali ada noise seperti kata-kata yang tidak relevan atau opini yang ambigu. Dengan menggunakan kernel trick dan pemilihan hyperplane yang optimal, SVM lebih tahan terhadap noise dibandingkan metode seperti Naïve Bayes atau Logistic Regression. Untuk klasifikasi sentimen publik, terkadang data yang tersedia tidak terlalu besar. SVM tetap dapat bekerja dengan baik meskipun jumlah data lebih sedikit dibandingkan deep learning yang membutuhkan dataset yang lebih besar.

Secara umum, algoritma seperti SVM hanya mengklasifikasikan sentimen ke dalam tiga kategori yaitu Negatif, Netral, dan Positif. Namun, klasifikasi tiga level ini dianggap belum mampu merepresentasikan spektrum emosi yang kompleks, terutama dalam isu kebijakan publik yang memicu reaksi beragam. Penelitian (Kausar et al., 2019) menunjukkan bahwa klasifikasi tiga kategori sering kali gagal menangkap nuansa opini pengguna, terutama dalam analisis ulasan daring atau isu sosial-politik. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pendekatan berbasis *Fuzzy Logic* dikembangkan sebagai pelengkap algoritma seperti SVM. Fuzzy Logic memungkinkan pemetaan sentimen ke dalam lima kategori (Sangat Negatif, Negatif, Netral, Positif, dan Sangat Positif), sehingga mampu menangkap gradasi intensitas opini dengan lebih akurat. Studi oleh (Gouthami & Hegde, 2021) menunjukkan bahwa kerangka multilevel berbasis Fuzzy Logic dapat memperhalus hasil klasifikasi dan memberikan interpretasi yang lebih bermakna dalam konteks pengambilan keputusan.

Berangkat dari dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa peluncuran Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) baru di Indonesia memicu respons publik yang sangat beragam, yang tersebar luas di berbagai platform media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Polarisasi opini publik ini menunjukkan pentingnya upaya sistematis untuk memahami persepsi masyarakat secara komprehensif terhadap kebijakan strategis pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode analisis yang tidak hanya mampu mengklasifikasikan sentimen publik secara akurat, tetapi juga dapat menangkap kompleksitas emosi yang muncul dalam wacana digital. Penelitian ini berjudul **“Analisis Sentimen Publik Terhadap Peluncuran Danantara di Media Sosial Twitter, Instagram dan TikTok Menggunakan Support Vector Machine Dan Pengembangan Skala Sentimen Melalui Fuzzy Logic”**.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana distribusi sentimen publik Terhadap peluncuran Danantara sebagai poros investasi nasional di media sosial Twitter, Instagram, dan TikTok?
- b. Bagaimana performa algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam mengklasifikasikan sentimen publik pada data media sosial?
- c. Bagaimana penerapan metode Fuzzy Logic dapat meningkatkan kompleksitas skala hasil analisis sentimen menjadi 5 kategori (sangat positif, positif, netral, negatif, sangat negatif)?
- d. Bagaimana hasil integrasi algoritma SVM dan Fuzzy Logic dalam menghasilkan model analisis sentimen yang lebih komprehensif, serta apa implikasinya terhadap bisnis, keuangan, dan komunikasi strategis?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Menganalisis distribusi sentimen publik terkait peluncuran Danantara sebagai poros investasi nasional di media sosial Twitter, Instagram, dan TikTok.
- b. Mengevaluasi performa algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam mengklasifikasikan sentimen publik pada data media sosial.
- c. Menerapkan metode Fuzzy Logic dalam analisis sentimen guna menghasilkan klasifikasi sentimen yang lebih kompleks dan terinterpretasi dengan baik.
- d. Membangun model analisis sentimen yang lebih komprehensif melalui integrasi metode SVM dan Fuzzy Logic, serta mengkaji implikasinya dari perspektif bisnis, keuangan, dan komunikasi strategis.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu Akademik, Praktis, dan Teknologi.

1.5.1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang analisis sentimen dengan menerapkan metode Support Vector Machine (SVM) dan pendekatan Fuzzy Logic, khususnya dalam konteks kajian media sosial dan kebijakan publik

1.5.2. Secara Praktis

dalam memahami opini publik terhadap peluncuran Danantara. Dengan mengetahui persepsi dan sentimen masyarakat, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas

1.5.3. Secara Teknologi

penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model analisis sentimen berbasis kecerdasan buatan yang mampu menginterpretasikan opini publik secara lebih akurat dan mendalam melalui skala sentimen yang lebih kompleks, melampaui klasifikasi konvensional tiga kategori menjadi lima tingkat sentimen yang lebih reflektif terhadap realitas emosi pengguna di ruang digital.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan

pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.